

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kerjasama antar negara atau kerjasama internasional adalah suatu hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan 2 negara atau lebih yang memiliki satu tujuan dan saling diuntungkan, karena pada kenyataannya setiap negara akan sulit untuk memenuhi kebutuhan negaranya apabila hanya mengandalkan negaranya sendiri (Nugroho, 2022). Menurut Charles Armor McClelland kerjasama internasional adalah upaya bersama antar negara untuk mencapai tujuan tertentu, baik yang bersifat ekonomi, politik, sosial, budaya, maupun pertahanan (McClelland, 1966).

Dikarenakan adanya perkembangan industri dan teknologi yang semakin maju membuat kebutuhan sebuah negara semakin banyak yang menyebabkan setiap negara harus terus melakukan ekspor-impor agar negaranya tetap bertahan. Tidak hanya di bidang ekonomi, perkembangan senjata untuk memperkuat militer negara juga semakin pesat, agar negaranya tidak terancam dalam bahaya setiap negara pasti melakukan kerjasama di bidang militer baik dalam kerjasama pertahanan yang melakukan latihan militer hingga jual-beli senjata akan dilakukan akan setiap negara agar dapat menimbulkan rasa aman bagi masyarakatnya, tidak hanya rasa aman, dengan adanya kerjasama, membuat negara yang

saling bekerjasama ini memiliki rasa kepercayaan satu sama lain (Aisyah, 2023).

Bahkan, Rusia yang merupakan negara dengan letak geografis yang luas dan merupakan negara lintas benua ini melakukan sebuah kerjasama seperti dengan China misalnya. Dapat diketahui bahwa China merupakan mitra dagang terbesar untuk Rusia, perdagangan China – Rusia pada tahun lalu mencapai US\$190 miliar atau sekitar Rp2,8 kuadriliun. Bagi China, Rusia juga merupakan negara yang penting, sebanyak 40% komoditas energi China telah meningkat pada tahun ini setelah China dan Rusia melakukan kerjasama di bidang perdagangan (Welle, 2023).

China sendiri sebagai negara yang memiliki *power* di kawasan Asia tentu melakukan kerjasama selain dengan Rusia, di kawasan Asia Timur China mencoba melakukan kerjasama melalui strategi *open regionalism* strategi ini membuat upaya politik China menjadi lebih mudah beradaptasi, mengingat China juga menghadapi berbagai masalah terkait keamanan regional dan perselisihan wilayah yang bisa berakibat negatif jika Asia Timur terjebak dalam regionalisme yang terisolasi (Wishanti, 2017).

Sayangnya kerjasama yang dilakukan China di Asia Timur dengan strategi *open regionalism* dikatakan kurang efektif kepada beberapa negara seperti Korea Selatan dan Jepang, karena kedua negara ini lebih dominan bekerjasama dengan Amerika Serikat contoh kerjasama yang terjadi adalah Korea Selatan dengan Amerika Serikat dan Amerika Serikat

dengan Jepang, untuk Korea Selatan sendiri jauh sebelum terbentuknya Korea Selatan dan Korea Utara, Amerika Serikat telah melakukan ikut serta dalam Perang Korea pada 25 Juni 1950 sampai 27 Juli 1953. Saat itu perang korea diunggulkan oleh Korea Utara karena adanya bantuan Uni Soviet yang menyokong senjata serta kiriman militer China, karena terdesaknya Korea Selatan akhirnya Amerika Serikat membantu menghentikan Perang Korea melalui persetujuan Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) tidak sampai disitu dibawah pimpinan Amerika Serikat, negara-negara yang merupakan anggota PBB memberikan bantuan militer kepada Korea Selatan (Lupita, 2018).

Peran Amerika Serikat dalam Perang Korea menimbulkan rasa kepercayaan pada Korea Selatan, sehingga Korea Selatan berani melakukan kerjasama dengan Amerika Serikat dalam bidang ekonomi, dengan bantuan ekonomi yang dikirimkan Amerika Serikat dan masa pemerintahan Sygman Rhee membuat perekonomian Korea Selatan mulai membaik, tepat pada tahun 1960, karena bantuan yang terus dilakukan oleh Amerika Serikat membuat Amerika Serikat menjadi investor tetap pertama Korea Selatan dibawah pimpinan Roh Moo Hyun. Korea Selatan dan Amerika Serikat terus melanjutkan kerjasama ekonominya menjadi KORUS FTA. KORUS FTA merupakan perjanjian kerjasama di bidang perdagangan bebas, dengan adanya KORUS FTA menghilangkan sekitar 96 persen tarif dari masing masing negara dalam jangka waktu lima tahun (Febriyanti, 2022).

Seperti halnya Korea Selatan, Amerika Serikat juga melakukan kerjasama dengan Jepang dimulai dari tahun 1860 dimana Keshogunan Tokugawa (Bakufu) memulai untuk mengirimkan delegasinya ke Amerika Serikat dengan tujuan untuk meratifikasi perjanjian persahabatan, perdagangan, dan navigasi antar kedua negara. Selanjutnya pasca bom Hiroshima dan Nagasaki Amerika Serikat mengirimkan perjanjian persahabatan dan perjanjian ini dinilai sukses karena mendapatkan dukungan masyarakat Jepang dengan mengirimkan 3020 pohon ceri ke Amerika Serikat, selain itu Amerika Serikat juga mengirimkan kontrak buruh karena adanya permasalahan buruh di Hawaii (Inouye, 1993).

Menurut Amerika Serikat kawasan Asia Timur dinilai sebagai *Factory of Asian*, yang setiap sub-wilayahnya berfungsi dengan baik sehingga menghasilkan produk yang bermutu. Oleh karena itu, Amerika Serikat sering melakukan kerjasama dengan Korea Selatan dan Jepang. Keterlibatan Amerika Serikat di setiap kawasan maupun negara menimbulkan persepsi ancaman bagi Korea Utara yang mengakibatkan Korea Utara melakukan perkembangan nuklir. Menurut Korea Utara yang dilakukan Amerika Serikat adalah bentuk hegemoni yang pada akhirnya akan membuat kawasan Asia Timur tunduk kepada Amerika Serikat. Oleh karena itu Korea Utara melakukan perkembangan nuklir agar dapat bertahan dari hegemoni Amerika Serikat (Sekarwati, 2021).

Berdasarkan fakta dan sejarahnya, Amerika Serikat memang negara yang terkenal akan hegemoninya di berbagai bidang baik secara *soft power* maupun *hard power* hal ini dapat dibuktikan dengan adanya keterlibatan

Amerika Serikat di setiap agenda internasional seperti *United Nation* ataupun kawasan seperti *East Asia Summit*, hegemoni Amerika Serikat bukan hanya dalam organisasi internasional saja melainkan dengan adanya perkembangan teknologi, militer serta perdagangan membuat berbagai bidang industri dikuasai oleh Amerika Serikat.

Amerika Serikat melakukan Hegemoni di Asia Timur sudah dimulai saat Perang Korea dan Pasca bom Hiroshima dan Nagasaki, hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan Amerika Serikat di setiap permasalahan dan agenda di Asia Timur. Namun sayangnya, akibat perkembangan nuklir Korea Utara membuat hegemoni yang telah dilakukan Amerika Serikat dapat terkikis sehingga Amerika Serikat merasa terancam dengan alasan stabilitas keamanan internasional dapat terganggu (CNN, 2021).

Senjata nuklir atau energi nuklir merujuk pada penggunaan energi yang dihasilkan dari reaksi nuklir, yang melibatkan inti atom. Reaksi nuklir dapat menghasilkan ledakan besar yang disebabkan oleh pelepasan energi dari pemisahan atau penggabungan inti atom. Senjata nuklir menggunakan reaksi nuklir untuk menciptakan ledakan besar dengan dampak yang merusak, sedangkan energi nuklir digunakan dalam reaktor nuklir untuk menghasilkan listrik atau tenaga panas. Senjata nuklir menggunakan reaksi fisi nuklir, inti atom dibelah menjadi dua, melepaskan energi yang sangat besar. Energi nuklir yang digunakan untuk pembangkit listrik biasanya melibatkan reaksi fusi nuklir atau fusi inti, di mana inti atom digabungkan untuk melepaskan energi. Energi nuklir

memiliki potensi besar sebagai sumber energi karena jumlah energi yang dihasilkannya per unit massa bahan bakunya sangat besar (Reditya, 2021).

Permasalahan nuklir di Korea Utara memang sudah tidak asing di dalam Hubungan Internasional, karena hal tersebut merupakan senjata pemusnah massal sehingga banyak negara tertuju ke Korea Utara karena memiliki program nuklir. Korea Utara memutuskan menggunakan peningkatan program nuklir karena kurangnya pertahanan keamanan nasional, menurut data yang tertulis di Arms Control Association “Korea Utara diperkirakan telah merakit 30 hulu ledak nuklir, pada Januari 2023, dan memiliki bahan fisil untuk sekitar 50-70 senjata nuklir, serta program senjata kimia dan biologi tingkat lanjut” (Arms Control Association, 2023).

Dampak dari pengembangan nuklir Korea Utara menjadi ancaman yang berbahaya bagi kehidupan manusia negara di kawasan Asia Timur khususnya Korea Selatan dan Jepang. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah kerjasama, kerjasama ini disebut sebagai *General Security of Military Information Agreement* (GSOMIA) merupakan sebuah kerjasama bilateral Jepang – Korea Selatan. Kerjasama GSOMIA memiliki sifat *legally binding* atau mengikat. Adapun kerjasama ini memuat syarat dan ketentuan untuk penanganan dan perlindungan informasi suatu negara ke negara lain, kerjasama ini akan terus diperbaharui setiap tahunnya. GSOMIA mengatur standar operasional prosedur alur informasi rahasia. Dikatakan bahwa informasi tersebut tidak akan diteruskan kepada pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan pihak lain walaupun informasi tersebut diinformasikan kepada pihak ketiga dikomunikasikan kepada pihak lain.

Selain itu, terdapat pembatasan pihak yang akan menangani informasi tersebut. (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2016). Kerjasama GSOMIA pertama kali dicetuskan oleh Jepang pada tahun 1989, namun karena saat itu provokasi yang dilakukan oleh Korea Utara belum dilakukan secara terus menerus maka para pihak yang bersangkutan belum menyetujui kerjasama ini. Setelah uji coba nuklir pertama dan kedua tepatnya pada tahun 2006 dan 2009 yang telah dilakukan oleh Korea Utara, dua negara yaitu Jepang dan Korea Selatan mulai memiliki minat terhadap kerjasama GSOMIA. Pembahasan terkait GSOMIA baru dimulai pada tahun 2011 yang dimana menteri pertahanan kedua negara sudah mulai bernegosiasi (Arpandi, 2021).

Setahun kemudian, pembahasan GSOMIA sudah masuk kedalam rapat kabinet namun sangat disayangkan sebelum kesepakatan tersebut ditandatangani proses tersebut dihentikan karena adanya penolakan GSOMIA dari masyarakat Korea Selatan, penolakan ini dibagi menjadi 2 kelompok yaitu konservatif dan liberal. Penolakan konservatif karena adanya permasalahan *comfort women* yang belum terselesaikan oleh Jepang dan penolakan liberal karena adanya ketidakpercayaan dengan pemerintah, dimana saat itu juga AS masih belum menentukan keterlibatannya dalam GSOMIA (Khanafi & Kurniawati, 2023).

Permasalahan dalam GSOMIA terus menerus terjadi terutama untuk masyarakat Korea Selatan sendiri, faktor-faktor yang diakibatkan oleh Presiden Myung Bak-Lee membuat ketidakpercayaan masyarakat hal ini kemudian menjadi akhir jabatan dari Presiden Myung Bak-Lee, dan

kemudian diganti oleh Presiden Park Geun-hye memiliki pertimbangan tersendiri hingga membuat kerjasama GSOMIA dapat disepakati (Jun, 2012).

Pada tahun 2019, Korea Selatan kembali menarik diri dari GSOMIA, karena adanya permasalahan perdagangan dengan Jepang dimana Tokyo memberhentikan ekspor dari Korea Selatan (The Peninsula, 2020), namun dengan adanya tekanan yang diberikan oleh Amerika Serikat, penarikan diri ini ditanggihkan dan Korea Selatan kembali menandatangani GSOMIA dengan kerjasama baru dimana Korea Selatan dapat menarik diri dari GSOMIA kapanpun (Nakagawa, 2023).

Karena adanya Amerika Serikat sebagai amity diantara Korea Selatan maupun Jepang, maka dari itu ancaman yang terjadi saat ini di kawasan Asia Timur yaitu perkembangan nuklir Korea Utara membuat Korea Selatan dan Jepang saling mempercayai satu sama lain. Meskipun disisi lain kedua negara ini memiliki sejarah yang kompleks karena Korea Selatan pernah dijajah oleh Jepang namun, dengan adanya penyerangan rudal dan perkembangan nuklir Korea Utara membuat kedua negara ini harus bekerjasama untuk menghadapinya (Haidah, 2022). Hubungan antara Korea Selatan dan Jepang dapat dibidang cukup kompleks dikarenakan adanya sejarah Jepang dimana Jepang menjajah Korea Selatan yang berdampak pada isu pelanggaran hak asasi manusia dan isu lingkungan. Akibatnya, hubungan kedua negara ini dipenuhi ketegangan dan permasalahanan ini dinilai kompleks namun karena adanya perkembangan nuklir Korea Utara membuat kedua negara ini harus

bekerja sama. Ditinjau dari letak geografisnya kedua negara tersebut merupakan negara yang cukup berdekatan dengan Korea Utara, sehingga perkembangan nuklir yang dilakukan Korea Utara dipandang sebagai tindakan provokatif yang mengancam stabilitas keamanan Korea Selatan dan Jepang. Maka secara tidak langsung menciptakan situasi *security dilemma* bagi Korea Selatan maupun Jepang.

Sebelum terjadinya GSOMIA berdasarkan faktanya Amerika Serikat telah bekerjasama dengan Jepang dan Korea Selatan di bidang militer, untuk Jepang sendiri terdapat kerjasama aliansi militer dimana Jepang merupakan tuan rumah pasukan Amerika Serikat terbanyak di dunia, sebanyak 55.000 anggota militer Amerika Serikat dan keluarganya telah tinggal di sana, sedangkan Korea Selatan sendiri telah membuka Garnisun Humphreys atau pangkalan militer Amerika Serikat dimana terdapat 28500 personel militer Amerika Serikat dan keluarganya. Kerjasama bilateral dari kedua negara inilah yang akhirnya memutuskan Amerika Serikat dapat bergabung pada kerjasama GSOMIA (CSIS, 2019). Tidak hanya bergabung, Amerika Serikat juga menjadi *amity* di kerjasama GSOMIA yang dimana pada saat itu masih dipimpin oleh pemerintahan Barack Obama yang sedang berkuasa di Amerika Serikat untuk menyempurnakan strateginya yaitu "poros ke Asia" berikut adalah upaya-upaya yang telah dilakukan Amerika Serikat terhadap Korea Utara (Saragih, 2020).

Pada bulan Mei 2013 pasca uji coba nuklir ketiga Obama telah menyimpan pertahanan nuklir di Korea Selatan dengan upaya menahan

program uji coba nuklir Korea Utara, Obama akhirnya menjatuhkan sanksi kepada Korea Utara yaitu Executive Order 13722 karena telah melakukan uji coba nuklir keempatnya, sanksi ini berisikan pernyataan tegas bahwa semua kegiatan ekonomi Amerika Serikat yang sedang dilakukan di Korea Utara diberhentikan (US Department Of The Treasury, 2016).

Tidak menghentikan aksi Korea Utara, Amerika Serikat kemudian menurunkan Executive Order 13810 karena meluncurkan rudal antar benua, sanksi ini bertujuan meningkatkan tekanan ekonomi terhadap rezim Korea Utara sebagai respons terhadap program senjata nuklir dan aktivitas yang dianggap sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Executive Order ini memberikan wewenang kepada Departemen Keuangan AS untuk memberlakukan sanksi tambahan terhadap individu, entitas, dan badan yang terlibat dalam aktivitas yang mendukung rezim Korea Utara. Sanksi ini dapat mencakup pembatasan perdagangan dan transaksi keuangan dengan pihak-pihak tersebut. Executive Order 13810 juga mendorong kerja sama internasional dalam menanggapi ancaman yang berasal dari Korea Utara. Ini mencakup upaya untuk memperkuat kerjasama dengan sekutu dan mitra Amerika Serikat dalam memberlakukan sanksi yang efektif dan mendukung tujuan nonproliferasi nuklir. (US Department Of The Treasury, 2017). Karena tidak adanya titik tengah antara Korea Utara di Asia Timur akhirnya pada *Trump-Kim Summit* Amerika Serikat menjanjikan keamanan kepada Korea Utara dengan syarat denuklirisasi (BBC, 2019).

Kehadiran *security dilemma* akibat nuklir Korea Utara dari Korea Selatan dan Jepang menjadi dasar dari keikutsertaan Amerika Serikat dalam GSOMIA (Choi, 2020). Amerika Serikat menganggap bahwa Jepang dan Korea Selatan merupakan sekutu yang berharga di kawasan Asia Timur, Amerika Serikat bersedia menjadi pihak eksternal yang menengahi antara Korea Selatan dan Jepang agar tidak terjadi konflik baru atau mundurnya salah satu negara dari GSOMIA (Vargo, 2019). Amerika Serikat juga meyakini bahwa tindakannya bergabung dengan GSOMIA untuk meminimalisir dari serangan pesaing Jepang dan Korea Selatan seperti Rusia dan China (CSIS, 2019).

Keberpihakan Amerika Serikat di GSOMIA sangat berpengaruh terhadap nuklir Korea Utara karena sebelumnya penyerangan yang dilakukan oleh Korea Utara terus menerus terjadi dan menimbulkan rasa tidak aman di Kawasan Asia Timur, seperti pada tahun 2019 tercatat Korea Utara diperkirakan memiliki 20-30 hulu ledak per Juni 2019, dan untuk bahan fisilnya sendiri sekitar 30-60 senjata nuklir, sedangkan untuk 2020 Korea Utara memiliki 20-100 hulu ledak. Dilanjut pada April 2021, Korea Utara diperkirakan memiliki 25-48 kg plutonium atau bahan fisil radioaktif, Korea Utara juga mengumumkan satu fasilitas pengayaan uranium, yaitu Pabrik Fabrikasi Batang Bahan Bakar Nuklir Yongbyon, yang diperkirakan memiliki 4.000 sentrifugal. Namun, pada tahun 2021, diperkirakan bahwa pabrik tersebut berkembang untuk menambah 1.000 sentrifugal (Arms Control Association, 2023).

Tidak hanya nuklir dan bahan radioaktif pada tahun 2022, menurut data *Stockholm International Peace Research Institute* Korea Utara telah melakukan lebih dari 90 uji coba rudal balistik jarak pendek, rudal balistik jarak menengah, rudal jelajah serangan darat, kendaraan luncur hipersonik, rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam (SLBM), rudal balistik antarbenua, dan rudal balistik antarbenua (Arms Control Association, 2023). Berikut perkembangan senjata nuklir Korea Utara yang menjadi ancaman di kawasan Asia Timur.

Korea Utara melakukan eksperimen nuklir pada tahun 2013 di lokasi Mantapsan, hal merupakan uji coba nuklir ketiga yang dilakukan oleh negara tersebut. Setelah tahap uji coba nuklir ketiga, Korea Utara melakukan tindakan provokatif dengan mengirimkan tiga tembakan menggunakan sistem Multiple Launch Rocket System, suatu jenis peluncur otomatis dengan mobilitas tinggi yang mampu menembakkan roket ke arah laut Jepang. (Japan Times, 2014). Pada tahun 2016, Korea Utara melakukan percobaan nuklir dengan menggunakan bom hidrogen. Setelah berhasil menjalankan uji coba nuklir tersebut, Korea Utara sekali lagi melakukan tindakan provokatif dengan meluncurkan rudal balistik jarak menengah ke arah Jepang, yang bertentangan dengan resolusi PBB. (BBC, 2016). Delapan bulan setelah melakukan uji coba nuklir yang keempat, Korea Utara melakukan uji coba nuklir yang kelima dengan menggunakan bahan peledak Trinitrotoluene (TNT) seberat 10 kiloton. Setahun setelah pelaksanaan uji coba dengan TNT, Korea Utara kembali

melakukan uji coba nuklir menggunakan bom hidrogen dengan daya ledak sekitar 140-250 kiloton.

Pada 2022 Korea Utara melakukan provokasi dengan mengeluarkan doktrin nuklir yang berbanding terbalik dengan doktrin nuklir 2016 yang telah dikeluarkan, dikutip dari Asia Pacific Leadership Network “Undang-undang penggunaan nuklir, yang diundangkan pada tanggal 8 September 2022, memiliki dua tujuan. Pertama, undang-undang itu menetapkan status bersenjata nuklir yang "tidak dapat diubah" dan memproyeksikan citra "negara bersenjata nuklir yang bertanggung jawab" untuk Korea Utara, yang kekuatan nuklirnya memiliki tujuan yang lebih luas mulai dari "mempertahankan kedaulatan, integritas teritorial, dan kepentingan fundamental negara" hingga "mencegah perang di Semenanjung Korea dan Asia Timur Laut" sembari "memastikan stabilitas strategis dunia" (Shaheen, 2023).

Sebulan setelah mengeluarkan doktrin nuklir, Korea Utara mengirimkan rudal balistiknya ke Wonsan sebagai bentuk ancaman terhadap Amerika Serikat (AS) yang sedang menjalin kerjasama GSOMIA dengan Korea Selatan dan Jepang (J. H. Kim, 2022). Sayangnya meski telah melakukan *Trump-Kim Summit*, Korea Utara kembali melakukan provokasi kepada Presiden Amerika Serikat yang baru yaitu Joe Biden, dengan cara mengeluarkan rudal barunya yang menurut Kim Jong-Un lebih mematikan dari sebelumnya (BBC, 2021). Namun, gertakan ini kembali dilawan oleh Joe Biden, menurutnya apabila Korea Utara berani menyerang Amerika Serikat beserta sekutunya maka, Amerika

Serikat dan sekutunya akan menghancurkan rezim Kim Jong-Un (Hutapea, 2023).

Tindakan Amerika Serikat kedalam kerjasama ini adalah bentuk hegemoni secara tidak langsung kepada negara-negara yang berada di Asia Timur, sehingga peneliti mengangkat fenomena ini dengan judul penelitian “**Keterlibatan Amerika Serikat Dalam Kerjasama Bilateral *General Security Of Information Agreement (Gsomia) Jepang – Korea Selatan Sebagai Upaya Hegemoni Amerika Serikat Di Kawasan Asia Timur***”.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada konteks dan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu kompleksitas kawasan Asia Timur khususnya Jepang, Korea Selatan dan Korea Utara menyebabkan hegemoni Amerika Serikat di kawasan Asia Timur dapat terkikis sehingga peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut “**Bagaimana Upaya Amerika Serikat dalam Mempertahankan Hegemoninya di Asia Timur Melalui *General Security Of Information Agreement*?**”.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah peneliti paparkan diatas yaitu kerjasama bilateral Jepang – Korea Selatan sebagai respon terhadap pengembangan rudal nuklir Korea Utara yang dianggap menimbulkan keadaan *security dilemma* bagi negara lain di kawasan Asia Timur. Di sisi lain, kehadiran Amerika Serikat di kawasan Asia Timur melalui kerjasama bilateral dengan Jepang dan Korea Selatan menambah

kompleksitas dinamika keamanan yang terjadi di kawasan Asia Timur. Sehingga dalam penelitian ini akan dibatasi untuk melihat fenomena hadirnya Amerika Serikat sebagai *intrusive system* yang mengambil peran di kawasan melalui kerjasama bilateral untuk merespon perilaku Korea Utara. Peneliti juga membatasi pada periode waktu yaitu pada tahun 2012 - 2019 periode ini menunjukkan peran Amerika Serikat sebelum terjadinya GSOMIA dan sesudah tertanda tangannya GSOMIA.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk lebih memahami kerjasama GSOMIA.
2. Untuk lebih memahami kompleksitas kawasan Asia Timur.
3. Untuk mengetahui hegemoni Amerika Serikat di kawasan Asia Timur.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

1. Sebagai sumber pengetahuan dan informasi, khususnya dalam studi Ilmu Hubungan Internasional.
2. Sebagai prasyarat kelulusan mata kuliah skripsi dalam program studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pasundan.